

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu *corporate governance* muncul sebagai solusi terhadap konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan, yang biasa disebut *agency problem*. Krisis keuangan yang melanda Asia pada sekitar tahun 1997, disinyalir merupakan akibat dari lemahnya penerapan *corporate governance* di negara-negara di Asia, khususnya Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Lemahnya penerapan *corporate governance* ditandai dengan perilaku manajemen yang mulai mementingkan kepentingan sendiri, sehingga mengabaikan kepentingan *investor* (pemilik perusahaan). Hal ini menyebabkan para *investor* berhenti melakukan investasi di perusahaan-perusahaan di Negara tersebut, yang sebagai akibatnya, menurunnya *inflows* dari Negara tersebut secara keseluruhan, sedangkan *outflows* (dianggap) tetap. Dengan menurunnya *inflows* tersebut karena lemahnya investasi di negara tersebut, maka harga saham agregat perusahaan-perusahaan di negara tersebut akan menurun. Hal ini menuntun pada rendahnya kinerja perusahaan-perusahaan di negara tersebut (Darmawati, Khomsiyah, dan Rahayu, 2004).

Karena hal tersebut di atas, *corporate governance* muncul ke permukaan. Ketika wewenang penggunaan segala sumber daya perusahaan menjadi berpindah ke tangan manajemen, kemudian manajemen cenderung mengabaikan kepentingan pemegang saham. Sementara para pemegang saham berharap manajemen dapat bertindak profesional dalam mengelola perusahaan dan segala sumber dayanya. Setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen seharusnya mementingkan kepentingan pemegang saham dan bertujuan untuk kepentingan pertumbuhan (nilai)

perusahaan. Namun, pada kenyataannya, para manajemen seringkali bertindak demi kepentingan manajemen saja, yang parahnya ternyata merugikan perusahaan. Dalam hal ini, maka terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Permasalahan inilah yang kemudian dikenal sebagai *agency problem*.

Kemunculan ide *corporate governance* diharapkan dapat menjadi solusi atas *agency problem*. *Good corporate governance* (GCG) dianggap dapat membantu mengendalikan perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga tidak mementingkan kepentingan manajemen, namun melindungi kepentingan para pemegang saham, sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LoI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) di Indonesia. Sejalan dengan langkah tersebut, pada tahun 1999, Pemerintah melalui Kep-10/M.EKUIIN/08/1999 membentuk suatu lembaga yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite ini bertugas untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang *corporate governance* (CG), antara lain meliputi *Code for Good Corporate Governance*. Selanjutnya Komite secara berkesinambungan bertugas memantau perbaikan di bidang CG di Indonesia. Hal ini kemudian diikuti oleh Bapepam dengan menerbitkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit; menerbitkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Jakarta Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa pada tanggal 1 Juli 2000; dan beberapa peraturan lainnya, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan publik (Suprayitno, Khomsiyah, Darmawati, Yasni, Susandi, dan Ratnawati, 2006).

Seiring dengan berkembangnya peraturan-peraturan mengenai penerapan *corporate governance*, timbul juga pertanyaan mengenai apakah peningkatan kualitas penerapan *corporate governance* secara efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik kinerja operasi maupun kinerja pasar?

Hubungan GCG dengan kinerja perusahaan telah diteliti oleh Klapper dan Love (2002), dimana hasilnya menyatakan bahwa CG yang lebih baik mempunyai korelasi yang tinggi terhadap kinerja operasi (dilihat dari ROA, *Gross Margin*, dan ROE) serta penilaian pasar yang lebih baik. Pendapat ini didukung oleh La Porta et al (2002) yang memaparkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang mencerminkan *good corporate governance*, dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan di Indonesia, Arsjah (2002) membuktikan *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja pasar (PBV) namun tidak semua komponen *corporate governance* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PBV. Hasil Penelitian Lestari (2007) yang mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ mengatakan bahwa ada beberapa faktor pada *corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, komisaris independen hanya berpengaruh positif terhadap kinerja pasar, tapi tidak berpengaruh pada kinerja profitabilitas. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pasar maupun profitabilitas. Auditor eksternal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja profitabilitas, tetapi tidak terhadap kinerja pasar. Sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik pasar maupun profitabilitas.

Dari beberapa penelitian di atas, maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan baik kinerja operasi maupun kinerja pasar, perusahaan perlu menerapkan *good corporate governance* di dalam perusahaannya.

Sebagaimana yang dikutip dari Lestari (2007), Tunggal (2002) memaparkan beberapa faktor dari *good corporate governance* antara lain komisaris independen, komite audit, auditor eksternal, dan pemegang saham.

Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu kuatnya kekuasaan eksekutif telah menjadi salah satu sebab tumbangannya perusahaan-perusahaan dunia seperti Enron Corp., WorldCom, dan lain-lain. Untuk mewujudkan perannya secara efektif, komisaris independen seharusnya menjadi organ utama bagi penerapan praktik *good corporate governance* dalam perusahaan. Seperti yang dikutip dari Ramaniya (2005), Black et al (2003) berdasarkan studi di Korea, menemukan bahwa perusahaan dengan 50% *outside directors* memiliki kapitalisasi pasar lebih besar 17% dari nilai buku aset. Hasil ini menunjukkan perbedaan dari penelitian di United States dan negara berkembang lainnya, dimana tidak ditemukan korelasi yang dapat diandalkan antara komposisi dewan dan kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Hasil penelitian Black et al (2003) masih sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dimana tidak terdapat hubungan yang pasti antara komposisi komisaris independen dengan kinerja perusahaan (Bhagat dan Black, 1999).

Praktik *good corporate governance* dapat meningkat dengan adanya komite audit yang efektif, sehingga dapat dikatakan komite audit adalah salah satu komponen penting dalam *corporate governance*. Penelitian Mayangsari dan Murtanto (2002) dan Ramaniya (2005) membuktikan bahwa keberadaan komite audit mempengaruhi minat investor terhadap perusahaan. Jumlah komite audit yang ditetapkan oleh BAPEPAM adalah sebanyak tiga orang. Namun, pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006, mayoritas telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh BAPEPAM. Untuk menghindari penelitian yang tidak dapat diambil kesimpulan, karena bisa saja perusahaan-perusahaan hanya berusaha

memenuhi persyaratan BAPEPAM saja, maka penelitian ini akan difokuskan pada, apakah perusahaan-perusahaan tersebut memiliki komite audit hanya sejumlah persyaratan BAPEPAM saja, yaitu sejumlah tiga orang, atau memiliki lebih dari tiga orang anggota komite audit (termasuk ketua). Karena saat ini, banyak perusahaan yang memiliki anggota komite audit lebih dari yang ditentukan oleh BAPEPAM, dengan alasan, perusahaan memang membutuhkan kehadiran komite audit, bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan BAPEPAM semata.

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka. Oleh karena itu, laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor eksternal dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan tersebut. Sebagaimana yang dikutip dari Ramaniya (2005), kualitas audit, menurut DeAngelo (1981), adalah kemungkinan seseorang akan (1) menemukan kecurangan dalam sistem akuntansi dan (2) melaporkan kecurangan tersebut. Mitton (2000) menemukan bahwa kualitas pengungkapan yang tinggi berhubungan dengan kinerja harga saham saat periode krisis (Juli 1997 sampai Agustus 1998). Dalam hipotesanya, Mitton menggunakan kantor akuntan publik (KAP) *Big Six* yang diharapkan akan menghasilkan tingkat kualitas pengungkapan yang tinggi, sehingga meningkatkan imbal hasil saham perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan regresi menggunakan variable KAP *Big Six* yang menghasilkan imbal hasil saham lebih tinggi 8,1% selama periode krisis (dengan mengontrol ukuran perusahaan, pinjaman, negara, dan industri). Berdasarkan penelitian di atas, muncul pendapat bahwa ukuran KAP

akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pemegang saham juga berperan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan untuk beberapa alasan. Dalam penelitiannya, Douma, George, dan Kabir (2003) meneliti perusahaan publik di India atas signifikansi pengaruh persentase kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan proxy *return on asset* (ROA), dan kinerja pasar. Dibuktikan bahwa persentase kepemilikan asing, baik kepemilikan institusi keuangan asing maupun korporasi asing, berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja profitabilitas dan kinerja pasar perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana faktor-faktor *corporate governance*, yaitu komisaris independen, komite audit, auditor eksternal, dan kepemilikan asing, dapat secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang dilihat melalui *price to book value* (PBV), dan kinerja profitabilitas perusahaan yang dilihat melalui *return on asset* (ROA), pada lima industri.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penulisan yang ditulis oleh Endah Lestari, dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan Publik Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta” pada tahun 2007. Pada penelitian tersebut, sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di BEJ pada tahun 2005, dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris bahwa komisaris independen berpengaruh

secara positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun penilaian pasar.

2. Membuktikan secara empiris bahwa komite audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun penilaian pasar.
3. Membuktikan secara empiris bahwa auditor eksternal berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun penilaian pasar.
4. Membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan asing berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun penilaian pasar.

Kontribusi penelitian ini adalah dengan mengambil sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 dari lima industri (semua industri, kecuali industri perbankan dan keuangan lainnya).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor saham maupun para pelaku bisnis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris tentang signifikansi pengaruh faktor-faktor *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas perusahaan maupun penilaian pasar.
2. Membantu investor dalam mempertimbangkan perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dalam pengambilan keputusan investasinya.
3. Membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis dampak ke kinerja perusahaannya apabila menerapkan *Good Corporate Governance*.

4. Memberi sumbang saran terhadap dunia pendidikan mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor *corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, deskripsi data dan metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Literatur

Bagian ini membahas teori – teori yang dijadikan landasan dalam membuat penelitian ini. Teori – teori yang akan dibahas berkaitan dengan *Corporate Governance, Agency Theory*, dan Kinerja Perusahaan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bagian ini membahas populasi, sampel, pengumpulan data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian

Membahas interpretasi data dan analisis hasil penelitian yang didapat dari perhitungan statistik yang diperoleh dari *software* statistik SPSS 15.0.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan saran – saran yang bisa digunakan dalam penelitian – penelitian sejenis selanjutnya.

